

Penataan Kawasan Sungai Winongo Berbasis Partisipasi Masyarakat di Pakuncen Yogyakarta

Wahidatul Rizqi Firianti
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Email: wahidatulrizqi16@gmail.com

Abstract

All major cities have slums located on the river. During this time the arrangement of slums was directly carried out by the government. But the results were often rejected because it isn't under the conditions of the community. This condition was pushed new concepts of the planning residential on the river are based on participation. The fact also made me discuss the process and implication of the arrangement residential Winongo River in Pakuncen Yogyakarta based on participation. This research is using a phenomenology approach. The data collected through the interview and observation process. The process of the arrangement River area is six steps, namely assessment, planning, lobbying, implication, monitoring, and evaluation. This study was founded that the arrangement River based on participation is implicated positively. The implication is seeking the change on environmental, attitude, and awareness of societies to kept habitation more than beautiful. In the other aspect, this activity was a growth cooperation spirit and the people of increase economic. However, the arrangement of the Winongo river area was still found by some adolescent making the location of the riverbank an unproductive gathering place. This event is considered able to disturb society because it is not following social norms. This condition needs counseling for the adolescent who are in puberty.

Keywords: arrangement of areas, participation; winongo river.

Abstrak

Hampir semua kota besar mempunyai permukiman kumuh yang berada di kawasan bantaran sungai. Selama ini penataan kawasan kumuh langsung dilakukan oleh pemerintah tapi hasilnya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kondisi semacam ini mendorong konsep baru dalam penataan kawasan sungai dengan berbasis partisipasi masyarakat. Fakta ini mendorong peneliti untuk mendiskusikan proses dan implikasi penataan kawasan Sungai Winongo di Pakuncen Yogyakarta berbasis partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Data dikumpulkan melalui proses wawancara dan observasi. Proses penataan kawasan ini melalui enam tahap, yakni *assasment* (identifikasi masalah), perencanaan, *lobbying*, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Studi ini menemukan bahwa progam penataan kawasan sungai berbasis partisipasi mayarakat berimplikasi positif. Implikasi penataan tersebut terlihat dalam perubahan kondisi fisik (lingkungan), perubahan perilaku masyarakat, dan kesadaran masyarakat untuk menjaga permukiman yang lebih asri. Pada aspek lain, kegiatan tersebut dapat menumbuhkan semangat gotong royong dan peningkatan ekonomi masyarakat. Namun demikian, penataan kawasan sungai Winongo



masih ditemukan sebagian remaja menjadikan lokasi bantaran sebagai ajang berkumpul yang tidak produktif. Ajang ini dianggap dapat meresahkan masyarakat karena tidak sesuai dengan normal sosial. Kondisi ini perlu ada pendampingan khusus kepada remaja yang berada pada masa pubertas.

Kata kunci: penataan kawasan; partisipasi masyarakat; bantaran sungai winongo.

Pendahuluan

Indonesia mempunyai sungai-sungai besar. Namun di bantaran sungai hampir memunculkan masalah baru dalam penataan permukiman yang cenderung kumuh (*slum area*). Kondisi ini terjadi di kota-kota besar, misal di Jakarta, Surabaya, Solo, Yogyakarta dan lainnya. Permukiman macam ini merupakan kawasan padat yang menempati lahan di tepi sungai sering dianggap penyebab terjadinya pencemaran lingkungan dan melahirkan masalah sosial. Di sisi lain, penghuni telah bertahun-tahun menempati lokasi tersebut menyebabkan pemerintah sulit untuk memindah atau menggusur masyarakat.

Kondisi semacam itu terjadi juga di Yogyakarta. Kawasan pusat kota Yogyakarta memiliki tingkat kepadatan dan harga tanah yang semakin tinggi, banyak orang terpinggirkan dan terpaksa memanfaatkan tepian sungai untuk permukiman.¹ Permukiman pinggir sungai menjadi kumuh dan memunculkan berbagai masalah sosial. Kondisi tersebut perlu dilakukan penanganan khusus kawasan untuk mencapai kondisi lingkungan permukiman yang sehat dan layak huni. Pentingnya penanganan permasalahan permukiman kumuh ini, sejalan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. Aturan ini menjadi landasan pemerintah untuk mewujudkan perumahan dan permukiman ramah lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.² Pemerintah selama ini

¹ Penyusun, "Laporan Antara Rencana Pengembangan Kawasan Sungai Winongo" (Yogyakarta, 2010), Jogjakota.go.id; M Slamet, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia* (Pembangunan (Bogor: IPB Press, 2003).

² Jawas Dwijo Putro, "Penataan Kawasan Kumuh Pinggir Sungai di Kecamatan Sungai Raya," *Jurnal Teknik Sipil* 11, no. 1 (2011).

telah melakukan berbagai macam program penataan yang terkadang identik dengan penggusuran. Akibatnya, terjadi perlawanan masyarakat terhadap program-program pemerintah tersebut.³ Meskipun demikian, ada cara baru dalam proses penataan kawasan sungai, yaitu dengan penataan yang berbasis partisipasi masyarakat.

Penataan berbasis partisipasi menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Hal ini misalnya terjadi dalam pembangunan Kampung Warna-Warni yang ada di daerah Jodipan, Malang. Masyarakat mampu menata ulang kampung yang dulunya kumuh menjadi lebih indah dan tanpa penggusuran.⁴ Terinspirasi dari Jodipan, kawasan di Yogyakarta yang melakukan penataan ulang permukiman adalah Kampung Pakuncen RW 10. Lokasi ini— pada awalnya—merupakan wilayah kumuh, tidak tertata, sarang masalah sosial, dan tidak *accessible* bagi layanan umum. Selain itu, lokasi ini juga mulanya sebagai kawasan langganan bencana banjir dan tidak layak huni. Jika terjadi banjir dan kebakaran, resiko bencana alam dan sosial pun tidak dapat dihindari. Apalagi akses ke lokasi tidak memiliki area yang mudah diakses karena jalan yang cukup sempit.

Kesadaran masyarakat untuk menghindari resiko bencana, keadaan Pakuncen telah berubah. Kampung yang dulunya tidak memiliki akses jalan, kini telah mempunyai fasilitas memadai, lingkungan juga sudah tertata rapi. Bahkan penataan kawasan ini dianggap berhasil sehingga Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memilih Pakuncen sebagai salah satu model penataan lingkungan sungai yang dapat direplikasi di Jakarta.⁵ Proses penataan kawasan tidak lepas dari lembaga yang melakukan pendampingan, yaitu

³ Abdur Rozaki, *Islam, Oligarki Politik, Dan Perlawanan Sosial* (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016); Abdul Wahid Situmorang, *Gerakan Sosial: Studi Kasus Beberapa Perlawanan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007); Agus Sudibyo, "Wacana Penjarahan dan Kekerasan Simbolik Terhadap Petani," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 2, no. 3 (1999): 71–89, <https://doi.org/10.22146/JSP.11150>.

⁴ Prakasa Yudha, Danar Oscar Radyan, & Fanani Angga Akbar, "Urban Tourism Based on Social Capital Development Model," *Eurasia: Economics & Business* 19, no. 1 (2019): 37–42, <https://doi.org/10.18551/econeurasia.2019-01>.

⁵ Maryati, "Anies Baswedan Pelajari Penataan Kawasan Sungai Winongo," *Antaraneews.com*, 2017, <https://www.antaraneews.com/berita/641285/anies-baswedan-pelajari-penataan-kawasan-sungai-winongo>.

Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA). FKWA mampu menjembatani aspirasi masyarakat dengan kepentingan pemerintah.

Peran FKWA dalam proses penataan kawasan sungai di Pakuncen cukup berhasil. Berbagai studi empiris menunjukkan hasil penataan kawasan sungai masih membutuhkan pola penyadaraan masyarakat agar peka terhadap lingkungan. Sekar Ika Indrawati menganalisis, setelah penataan kawasan Sungai Winongo berhasil, kini mampu dimanfaatkan masyarakat untuk budidaya karamba dan pelestarian tanaman vegetasi di sepanjang tebing sungai.⁶ Kegiatan tersebut menjadi modal untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam penelitiannya, langkah-langkah yang digunakan melalui proses observasi di lokasi penelitian, mengikuti proses perencanaan, dan memantau pelaksanaan pemanfaatan budidaya keramba. Secara umum, kegiatan penataan kawasan Sungai Winongo memiliki kontribusi nyata dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

Studi Karim memberikan perspektif lain bahwa perilaku masyarakat dalam memperlakukan sungai sangat buruk. Sungai masih dijadikan tempat membuang sampah limbah rumah tangga.⁷ Studi Widodo juga memberikan catatan tentang merubah perilaku masyarakat tersebut. Merubah perilaku perlu melakukan proses pemberdayaan berbasis partisipasi masyarakat.⁸

Konteks perubahan perilaku merupakan proses yang tidak mudah namun bukan mustahil. Dengan demikian, proses penataan sungai harus meliputi beberapa tahap, yakni *assessment* (identifikasi masalah), perencanaan alternatif program, pelaksanaan (implementasi), monitoring atau pemantauan, dan evaluasi program.⁹ Sementara itu, proses penataan

⁶ Sekar Ika Indrawati, "Keragaman Pemanfaatan Sungai oleh Masyarakat Bantaran Sungai Winongo di Kecamatan Ngampilan dan Mantriweron Kota Yogyakarta Tahun 2010" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012).

⁷ Tony Karim, "Pengaruh Penataan Bantaran Sungai Bau-Bau Terhadap Pola Hunian Masyarakat di Kelurahan Tomba dan Bataraguru Kota Bau-Bau" (Universitas Diponegoro, 2010).

⁸ Widodo Brontowiyono, Ribut Lupiyanto, dan Donan Wijaya, "Pengelolaan Kawasan Sungai Code Berbasis Masyarakat Widodo," *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan* 2, no. 1 (2010): 7–20, <https://doi.org/10.20885/jstl.vol2.iss1.art2>.

⁹ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 247-252.

kawasan sungai berbasis masyarakat merupakan pendekatan yang bersifat *bottom up* dan partisipatif. Masyarakat diberikan keleluasaan berperan aktif untuk menyampaikan gagasan dan ide awal sampai akhir. Konteks semacam ini dapat dikategorikan sebagai pola penataan kawasan sungai berbasis partisipasi masyarakat. Partisipasi dapat diartikan sebagai proses keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan. Pemaknaan ini memberi ruang masyarakat untuk terlibat lebih luas dalam proses pembangunan. Hal ini seperti pemikiran Britha Mikkelsen yang menjelaskan pemberdayaan masyarakat berbasis masyarakat melalui tahap keterlibatan pada identifikasi masalah, proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, monitoring, dan mitigasi.¹⁰

Berdasarkan temuan penelitian di atas menunjukkan bahwa studi penataan kawasan sungai perlu mempertimbangkan keterlibatan masyarakat secara aktif. Oleh karena itu, penelitian tentang penataan kawasan Sungai Winongo di Pakuncen membutuhkan model pemberdayaan berbasis partisipasi masyarakat. Model ini perlu diupayakan oleh tim pendamping Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA). Studi ini bermaksud untuk mengkaji penataan kawasan kumuh dibantaran Sungai Winongo berbasis partisipasi agar masyarakat lebih peka terhadap keadaan lingkungan. Artikel ini bukan *blue print* perumusan kebijakan. Peneliti hanya memberikan perspektif baru tentang penataan kawasan sungai dalam diskursus pemberdayaan masyarakat.

Kajian ini merupakan hasil pengembangan tugas akhir untuk menyelesaikan studi strata satu. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan bersifat fenomenologis.¹¹ Proses pengambilan data dilakukan melalui observasi dan interview langsung kepada informan yang beraktivitas di sekitar kawasan Sungai Winongo; tokoh masyarakat RW 10 Pakuncen,

¹⁰ Britha Mikkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*, ed. Matheos Nalle (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal. 64.

¹¹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010); Siti Aminah, "Fenomena Social Loafing dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Binaan Pmi: Studi Fenomenologi dalam Praktek Pengembangan Masyarakat," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan* 1, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.14421/jpm.2017.011-07>.

pengurus FKWA, masyarakat yang tinggal di kawasan sungai, stakeholder pemerintah, dan akademisi.

Proses Penataan Kawasan Sungai Winongo

Awal mula penataan kawasan Sungai Winongo dilakukan proses sosialisasi dari FKWA. Kegiatan ini terselenggara di Pendopo Sawo tahun 2012. Sosialisasi dijadikan FKWA sebagai kampanye kesadaran untuk menghargai lingkungan dan ajakan kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap sungai. Dalam pertemuan tersebut dihadiri perwakilan FKWA, Purnomo. Pada saat itu, Purnomo mencari informasi tentang masalah yang terjadi di Pakuncen. Permasalahan awal ditemukan karena kandang sapi di bantaran sungai. Kandang sapi menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu. Masyarakat hanya memiliki akses menuju permukiman menjadi satu arah. Hal ini terjadi ketika proses penurunan sapi dari kandang.

Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat tidak memiliki akses jalan apabila ada acara seperti hajatan dan *lelayu* (bela sungkawa) karena meninggal dunia. Berdasarkan masalah yang terjadi di Pakuncen, tim pendamping program FKWA turun untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Kegiatan ini melalui enam tahap, yaitu *assessment* (identifikasi masalah), *lobbying*, perencanaan program, pelaksanaan program, monitoring, dan evaluasi.

Assessment (Identifikasi Masalah)

Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah masyarakat kawasan Sungai Winongo.¹² Data assesment ini digunakan sebagai keperluan observasi awal untuk mengelaborasi masalah sosial dan pembangunan fisik permukiman warga. Jika data sudah terpenuhi diharapkan menjadi langkah untuk memulai penataan bantaran sungai agar tidak terjadi tumpang

¹² Aziz Muslim, "Manajemen Pengelolaan Masjid," *Aplikasia* 5, no. 2 (2004); Aziz Muslim, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012), hal. 35.

tindih program. Alih-alih melakukan program, namun fakta dilapangan tim pendamping FKWA dikira sebagai pegawai survei pemerintah yang akan melakukan penggusuran. Isu penggusuran ini menjadi masalah baru sehingga masyarakat memandang tidak perlu adanya pendataan melalui survei.

Proses *assessment* ini akan menjadi kendala apabila masih ditemukan pemikiran masyarakat yang tertutup. Tentu saja, proses *assessment* tidak bisa obyektif ketika menyesuaikan data dan informasi untuk membuat program penataan bantaran sungai. Menghindari salah persepsi masyarakat tersebut pemerintah berupaya melakukan penataan kawasan sungai dengan membuat *Standar Operational Procedure* (SOP). Pembuatan SOP disesuaikan dengan *Aset Based Community Development* (ABCD). Bermula dari mimpi masyarakat untuk berpikir tentang penataan kawasan yang tidak kumuh dan tidak dibedakan dengan wilayah lain. Proses ini cukup berhasil. Keterlibatan masyarakat pada proses *assesment* membuat pandangan berubah. Program penataan pun mulai terbuka dan dapat dijalankan.

Penyusunan Perencanaan

Proses ini merupakan tahap penting dalam rangkaian kegiatan penataan kawasan Sungai Winongo. Perencanaan progam tentu disesuaikan kebutuhan masyarakat. Tim FKWA bersama dengan masyarakat mampu memecahkan masalah mereka.

Kegiatan ini dilakuakn melalui proses *Focus Group Discussion* (FGD). Dengan metode ini masyarakat dapat terlibat langsung dan berfikir jernih untuk menyelesaikan masalah yang muncul. Hasil FGD pun melahirkan alternatif program yang dapat di *follow up*.¹³

FGD pertama kali dilakukan pada tahun 2012 di Pendopo Sawo. Forum ini dihadiri pengurus RW 10 dan 11, tokoh masyarakat, ketua RT, dan tim pendamping FKWA. Hasil pertemuan menghasilkan kesepakatan penataan kawasan, solusi masalah sampah, dan kampanye sungai. FKWA menjadi

¹³ Muslim, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, hal. 36.

penghubung usulan masyarakat kepada pemerintah. FKWA mengupayakan dinas terkait untuk melakukan penataan kawasan sungai. Namun usulan tidak langsung di eksekusi oleh dinas. Proses FGD pun berlanjut. Kegiatan ini mengajak warga Pakuncen mulai untuk bermimpi. Proses berlanjut dengan sosial eko *mapping* dengan harapan masyarakat bisa mengenali potensi diri. Hasil FGD tersebut melahirkan *grand desaign* sementara dengan gambar sederhana. Desaign ini mulai dilakukan dengan membuat slot program pembangunan *talud* permukiman untuk RW 10.

Program *talud* pun menjadi perencanaan yang bersifat *bottom up* dan partisipatif. Perencanaan. *Bottom up* artinya perencanaan yang menitikberatkan masyarakat agar lebih berperan dalam program yang dijalankan. Perencanaan dirumuskan oleh fasilitator bersama masyarakat penerima manfaat, praktisi, dan penentu kebijakan yang berkaitan dengan penataan kawasan Sungai Winongo. Proses ini dilakukan sejak awal yang bertujuan agar masyarakat terlibat dan berperan aktif proses penyusunan program. Namun perencanaan ini dianggap terlambat bagi FKWA karena tidak seimbang antara pembangunan di Ngampilan dengan di Pakuncen. Namun demikian, program penataan bantaran sungai Winongo berhasil dilaksanakan hingga 2016.

Tabel 1. Usulan Perencanaan Kawasan Sungai tahun 2016

No	Nama usulan Kegiatan	Lokasi
1	Pembangunan Hidran	2 Lokasi (1 RT 47 dan RT 45)
2	Pembangunan Pembangunan sepanjang talud	200 M (sepanjang talud sungai)
3	Pemasangan Water Meter	
4	Pembangunan Talud Makam	200 M
5	Perbaikan IPAL Komunal	400 M
6	Pembangunan PAM RW	2 Lokasi (RT 46 dan RT 47)
7	Ruang Terbuka Hijau	Di Bantaran Sungai
8	Jalan Konblok	400 M (seluruh RW 10)

9	Pembangunan jalan akses ke sungai	20 M
10	Pembangunan Gazebo	6 buah
11	Pembangunan Pendopo untuk kegiatan warga	1 buah
12	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	3 Rumah (RT 46)
13	Pembangunan Rumah Bantaran Sungai (M3K)	3 RT 47 dan 3 RT 46

Sumber: Data primer diolah, 2017.

Dari data lapangan, usulan perencanaan penataan kawasan Sungai Winongo berbasis masyarakat oleh Forum Komunikasi Winongo Asri di Pakuncen Yogyakarta ada beberapa aspek Fisik dan Non Fisik. Penataan kawasan Sungai Winongo untuk mengurangi kekumuhan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Target utama yang muncul antara lain: pertama, aspek kondisi bangunan gedung dengan kriteria ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan, dan ketidaksesuaian dengan porsi teknis bangunan. Kedua, aspek kondisi jalan lingkungan dengan kriteria cakupan pelayanan jalan lingkungan dan kualitas permukaan jalan lingkungan. Ketiga, aspek kondisi penyediaan air minum dengan kriteria ketersediaan akses aman air minum dan terpenuhinya kebutuhan air minum. Keempat, aspek kondisi drainase lingkungan yang mempunyai kriteria ketidakmampuan mengalirkan air, ketidakterediaan *Drainase*, tidak terhubungnya sistem *drainase* kota dan kualitas konstruksi drainase. Kelima, aspek kondisi pengelolaan air limbah. Kriteria tersebut adalah sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai teknis, sarana dan prasarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Aspek selanjutnya terkait kondisi pengelolaan sampah yang mempunyai kriteria sarana prasarana dan sistem yang tidak sesuai dengan standar. Terakhir, dilihat dari penanggulangan risiko bencana. Aspek kondisi proteksi kebakaran diusulkan oleh warga karena rentannya kebakaran yang ada di wilayah RW 10 dengan harapan dibuatkan kawasan

hidran.

Lobbying: Membawa Usulan Masyarakat Ke Pemerintah

Berdasarkan kesepakatan hasil perencanaan bersama, FKWA melakukan fungsi sebagai broker. FKWA membuat mapping/pemetaan berupa grand desain perencanaan yang disampaikan ke pemerintah sebagai pengelola dana untuk mewujudkan kehendak masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut adalah Dinas PU ESDM (Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral), BBWSSO (Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak), Dinas PUPKP (Pekerjaan Umum, Perumah dan Kawasan Permukiman), BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). Setelah itu, FKWA audiensi kepada lembaga terkait. Hasil audiensi ditanggapi positif oleh pemerintah. Namun pemerintah tidak bisa mengeksekusi pada tahun tersebut. Namun menganggarkan pada tahun berikutnya. Dalam pelaksanaannya dilakukan tahun 2012-2017. Dalam tahapan lobbying ini FKWA berupaya untuk menjadi penghubung ke dinas terkait dalam menyelesaikan persoalan. Gambar 20 menunjukkan bahwa Ibu Endang dan Ibu Ana melakukan koordinasi terkait pembangunan Jembatan di wilayah Pakuncen RW 10. Dalam gambar 21 adanya proses pemaparan koridor permukiman di Sungai Winongo dalam gambar tersebut tidak hanya Ibu Endang saja namun ada beberapa anggota FKWA. Terakhir adalah lobbying penanganan kawasan permukiman.

Pelaksanaan Penataan Kawasan Sungai Winongo

Tahapan selanjutnya setelah tahap pelaksanaan. Pada tahap ini masyarakat mengimplementasikan apa saja yang telah dirumuskan bersama-sama. Tahap ini sangat krusial karena sesuatu yang sudah direncanakan terkadang dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerja sama antara masyarakat, komunitas dan pemerintah sendiri. Dalam hal ini secara tidak langsung ada pemberdayaan masyarakat yang merupakan serangkaian tindakan komunitas dan masyarakat yang perlu diberdayakan

melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian informasi terkait akses dan peluang untuk mencapai sistem sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan.

Pelaksanaan program penataan ini melibatkan masyarakat secara partisipatif dan aktif pada setiap prosesnya. Dengan pelibatan ini masyarakat merasa memiliki dan bertanggungjawab dengan apa yang mereka bangun. pembangunan awal pada tahun 2012 pembukaan akses jalan di Pakuncen. Pelibatan masyarakat dalam pembangunan ini berjalan pada tahun 2013 yang saat itu ada program pembangunan talud pengaman sungai dan awal mulanya bank sampah "Migunani". Tahun 2014 di Pakuncen ini ada kegiatan festival Sungai Winongo dan pembangunan talud permukiman. Pada tahun 2015 awal pembangunan talud permukiman tahap kedua., pada tahun ini juga di pertengahan tahun pembangunan talud dan jembatan untuk dijadikan akses ke wilayah seberang. Kemudian tahun 2016 adanya pembangunan selokan air hujan dan pengaspalan jalan. Selokan air hujan ini agar saat musim hujan mengurangi genangan air yang ada di jalan. FKWA bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan GIZ (German Organisation for International Cooperation) dalam kegiatan peningkatan kapasitas *building mapping* (eko mapping). Kegiatan ini mengajak masyarakat berdiskusi dan berfikir tentang permasalahan yang memberikan solusi untuk penataan kawasan di tahun 2015 dan 2016. Terakhir tahun 2017 pengadaan IPAL Komunal untuk limbah masyarakat. Setelah tahun 2014, kegiatannya dibangun pemenang tender. Meskipun demikian masyarakat juga dipekerjakan sebagai buruh oleh pemenang tender. Program yang terlaksana adalah sebagai berikut: pembangunan pengaman sepanjang talud, pembangunan talud makam, pembangunan jalan akses ke sungai, ruang terbuka hijau dibantaran sungai, pembangunan rumah tidak layak huni, pembangunan rumah bantaran sungai (M3K).

Penataan kawasan Sungai Winongo yang sudah dilaksanakan ada yang berasal dari perencanaan masyarakat dan pada kenyataannya tidak semua usulan masyarakat diterima oleh SKPD terkait. Pembangunan ini dilakukan

secara bertahap. Waktu yang digunakan untuk proses pembangunan ini ada yang 3 bulan ada pula yang 6 bulan tergantung pada pekerjaan yang dilakukan. Namun, dalam pelaksanaan pembangunan ini keberlanjutan dari tahun sebelumnya. pelaksanaan pembangunan di Pakuncen itu setiap tahunnya ada anggaran dari pemerintah. Terkadang dalam pembangunan ini ada tumpang tindih alokasi pekerjaan yang dikerjakan oleh berbagai instansi. Pakuncen mendapat tiga sumber dana untuk penataan kawasan. Pakuncen bisa seperti ini karena masuk dalam SK Walikota No 216 tahun 2016 penetapan lokasi kawasan kumuh di Kota Yogyakarta yang didalamnya ada Kecamatan Wirobajan, Kelurahan Pakuncen lokasi RW 8, 10, dan 11 dengan Luas 10,17 Ha.

Monitoring (Pemantauan)

Proses selanjutnya dalam penataan kawasan sungai yakni adalah monitoring (pemantauan). Monitoring adalah proses berkala pengumpulan data dari proses assessment hingga proses evaluasi dan pengukuran kemajuan progres program. Secara garis besar monitoring adalah memantau jalannya program yang fokus proses dan output program tersebut. Biasanya monitoring dan evaluasi berjalan bersama, akan tetapi pada dasarnya proses monitoring itu tidak hanya bersamaan dengan proses evaluasi namun proses pemantauan ini ada pada tiap tahapan proses.

Pemantauan atau monitoring dalam penataan kawasan sungai ini secara formal dilakukan oleh pemerintah. Meskipun demikian masyarakat dan FKWA juga memantau pelaksanaan kegiatan. Salah satunya jika ada persoalan mereka memotret dan disampaikan melalui media sosial ke FKWA. Laporan tersebut dilanjutkan FKWA untuk disampaikan kepada pemerintah. Hal ini terjadi karena masyarakat menganggap pemerintah kurang intens dalam monitoring pembangunan.

Monitoring atau pemantauan yang dilakukan oleh FKWA maupun SKPD yang terkait sudah berjalan dan dilakukan dengan semestinya, bagi

FKWA proses pemantauam dari penataan kawasan sungai merupakan tanggungjawab bersama dan dapat dilakukan tidak harus oleh lembaga tapi bisa pula dipantau oleh pengurus/tokoh masyarakat yang ada di wilayah. proses monitoring penataan kawasan sungai tidak secara langsung dilakukan oleh FKWA walaupun demikian monitoring sudah dipasrahkan ke tokoh masyarakat ataupun perwakilan per titik oleh perwakilan FKWA. Hal ini dengan harapan bahwa pemantauan ini tidak hanya terjadi bersamaan dengan evaluasi. Jadi, pada tahap ini sudah dilakukan sejak awal pengidentifikasian kebutuhan atau proses assessment.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat penulis menyimpulkan tahap pemantauan atau monitoring progam penataan kawasan sungai menjadi barometer masyarakat untuk pelaksanaan progam. Adanya tahap monitoring di setiap proses penataan kawasan Sungai Winongo berbasis masyarakat di Pakuncen ini baik FKWA maupun instansi yang terkait dan masyarakat yang terlibat mempunyai peran penting sebagai penggerak masyarakat.

Evaluasi

Proses yang terakhir yakni evaluasi. Evaluasi dilakukan oleh pemerintah yang mengundang tokoh-tokoh masyarakat Pakuncen dan pengurus FKWA. Namun sebelum evalusi formal, tokoh-tokoh masyarakat juga sudah melakukan evaluasi lokal yang mengundang masyarakat secara umum. Evaluasi lokal itu kemudian disampaikan ke pemerintah. Evaluasi ini berperan menjadi penting dalam hal memperbaiki progam yang telah berjalan pada tahun sebelumnya. Adanya evaluasi juga sebagai barometer pelaksanaan penataan kawasan sungai di Pakuncen dapat memberikan penilaian terhadap kegiatan yang terlaksana. dapat diartikan bahwa proses Evaluasi dilakukan secara musyawarah bersama dengan masyarakat. Harapannya jika ada hal yang perlu diperbaiki masyarakat tahu apa saja yang harus dan tidak harus dilakukan.

Evaluasi ini berperan penting ketika pada saat proses pelaksanaan penataan kawasan sungai tidak sesuai dengan proses perencanaan. Tahap evaluasi menjadi rangkaian yang dapat dijadikan bahan pertimbangan hal-hal yang berkaitan dengan penataan kawasan sungai, kendala-kendala dan hambatan dalam penataan kawasan sungai bisa menjadi catatan di proses penataan kawasan Sungai Winongo. Dapat dipahami dari data yang diperoleh dilapangan bahwa proses evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat bantaran Sungai Winongo tepatnya RW 10 adalah dengan melihat capaian yang telah dilakukan FKWA, masyarakat, dan stakeholder yang terkait dan memantau sejauh mana perkembangan atau dampak penataan kawasan Sungai Winongo di masyarakat. Sedangkan dari FKWA dalam proses evaluasi ini lebih kepada keterlibatan masyarakat dalam proses penataan kawasan Sungai Winongo. Maksudnya adalah proses evaluasi menjadi tanggungjawab bersama dengan masyarakat. Peran FKWA dalam proses penataan kawasan Sungai Winongo berbasis masyarakat di Pakuncen Yogyakarta adalah sebagai mediator dan mengawal jalannya proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan penataan kawasan Sungai Winongo. Hal yang berkaitan dengan teknis diserahkan kepada masyarakat bantaran sungai agar masyarakat merasa memiliki bahwa penataan kawasan sungai adalah kebutuhan warga bukan kebutuhan pemerintah ataupun yang lainnya. Penulis dapat menyimpulkan bahwa proses evaluasi sudah dilakukan proses evaluasi berbasis masyarakat meskipun dilakukan perwakilan. Dalam evaluasi itu keluhan masyarakat langsung didengarkan oleh pemerintah. Persoalan yang muncul adalah adanya salah paham dalam pelaksanaan proyek dan persoalan status tanah/sertifikat yang sampai saat ini belum terpecahkan. Dalam proses tersebut pemerintah berjanji akan lebih baik.

Implikasi Penataan Kawasan Sungai Winongo Bagi Kehidupan Masyarakat

Implikasi merupakan akibat adanya suatu tahapan kegiatan yang dilakukan. Dengan adanya penataan kawasan Sungai Winongo tentunya ada

hal berbeda yang dapat dirasakan oleh Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA) serta masyarakat yang berdampak di sekitarnya, yaitu dampak perubahan kondisi fisik/lingkungan, dampak perubahan perilaku, dan dampak ekonomi.

Dengan demikian, dampak perubahan kondisi fisik/lingkungan yang sudah ada di RW 10 Pakuncen adalah adanya jalan inspeksi, pembangunan talud permukiman, pembangunan talud makam, adanya saluran air hujan, saluran pengairan drainase. Pembangunan pembangunan ini membuat kondisi Pakuncen terlihat semakin rapi. Bahkan kandang sapi yang dulunya kumuh sudah ditata dengan baik, sehingga kotorannya tidak mencemari sungai dan lingkungan. Kandang sapi yang dulunya kumuh saat ini disebut “Asrama Sapi” karena bersih. Pembangunan talud juga menyebabkan kawasan ini semakin kuat dalam menahan banjir dan tanah longsor. Pakuncen dulu dikenal dengan daerah kumuh, namun saat ini Pakuncen sudah terlihat bersih.

Setelah adanya penataan terkait sampah, banjir sudah dapat diatasi. Penataan ini berbasis masyarakat, yakni masyarakat berperan aktif dalam prosesnya. Penataan kawasan di Pakuncen ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan kondisi wilayah, seperti akses jalan permukiman yang menuju ke Sungai Winongo, dan talud permukiman di RW 10 Pakuncen. Sebelum adanya penataan ini, kondisi Sungai Winongo yang ada di Pakuncen dipenuhi dengan tumpukan sampah dan limbah yang dapat menyebabkan pencemaran air. Jika musim hujan tiba, kondisi tersebut dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Namun, setelah terdapat penataan kawasan di Sungai Winongo, potensi permasalahan tersebut dapat diatasi. Selain itu, di kawasan Sungai Winongo juga dilengkapi dengan talud yang berfungsi untuk mencegah terjadinya tanah longsor.

Tabel 2. Hasil Penataan dan Dampak Penataan Kawasan Sungai di RW 10 Pakuncen

No	Hasil Penataan	Dampak
1.	Pembukaan Jalan ke Sungai Winongo	Sebagai akses masyarakat untuk beraktifitas sehari-hari.
2.	Talud pengaman sungai	Untuk menahan banjir dan longsor
3.	Talud permukiman	Untuk melindungi permukiman yang di atasnya jika musim hujan talud ini dapat menahan permukiman yang ada di bantaran sungai
4.	Jembatan	Untuk menyeberang warga agar mudah untuk aktivitas sehari-hari. Apalagi banyak pedagang di Pasar Serangan dan Klitikan.
5.	IPAL Komunal	Untuk mengatur limbah rumah tangga masyarakat
6.	Selokan air hujan	Sebagai resapan air ketika musim hujan

Sumber : olah data penulis dari hasil wawancara dan observasi, 2017.

Bukan hanya berdampak pada infrastruktur saja, namun penataan kawasan Sungai Winongo ini juga berdampak pada perubahan non fisik, seperti perubahan perilaku masyarakat, perubahan ekonomi, serta munculnya dampak positif setelah adanya penataan di kawasan ini. Dampak sosial dari penataan kawasan Sungai Winongo adalah terbentuknya masyarakat yang sadar akan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Hal ini juga berdampak pada perilaku, sikap dan tindakan masyarakat.. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa terdapat perilaku masyarakat yang kurang baik, yakni membuang sampah dan BAB di sungai. Masyarakat belum menyadari bahwa menjaga kebersihan sungai merupakan persoalan yang penting. Dengan adanya penataan kawasan Sungai Winongo, terjadilah perubahan pada masyarakat. Perubahan ini juga diikuti dengan perubahan pola hunian

masyarakat. Dampak sosial yang terjadi setelah penataan kawasan Sungai Winongo adalah perubahan perilaku masyarakat. Awalnya masyarakat masih menganggap bahwa sungai adalah tempat untuk pembuangan sampah. . Perilaku masyarakat yang semula membuang sampah di sungai, saat ini sudah berkurang. Hal tersebut didukung dengan adanya Bank Sampah. Saat ini, di kota terdapat 54 Bank Sampah yang tersebar di sepanjang Sungai Winongo. Selain itu juga terdapat perubahan di kawasan pinggir sungai. Awalnya pinggir sungai digunakan sebagai tempat pembuangan sampah. Akan tetapi, saat ini kawasan pinggir sungai sudah diubah menjadi kawasan hijau dan dijadikan sebagai ruang publik. Karamba yang terdapat di pinggiran sungai pun mulai dikurangi, tujuannya untuk memperlancar aliran air.

Dampak sosial yang kedua adalah adanya tingkatan adaptasi pada tindakan masyarakat terhadap penataan kawasan Sungai Winongo di Pakuncen Selain tingkatan adaptasi, juga terdapat aspirasi masyarakat yang dapat memberikan bermacam gagasan terhadap penataan kawasan sungai. Aspirasi masyarakat merupakan usulan, ide, keinginan, kehendak yang disertai harapan agar bisa tercapai dan diwujudkan. Dalam penataan kawasan Sungai Winongo, aspirasi masyarakat ditampung sejak tahap assessment dan perencanaan. Masyarakat berperan aktif dalam merumuskan suatu progam/cita-cita luhur dalam proses pembangunan. Aspirasi yang digunakan masyarakat berbagai macam bentuknya, yakni tertulis dan lisan. Dalam proses perencanaan misalnya, masyarakat lebih menggunakan aspirasi lisan karena peran masyarakat menjadi hal utama dalam proses perencanaan. Hal ini menjadi dampak sosial dan perilaku terhadap masyarakat bantaran sungai yang dilibatkan dalam penyampaian aspirasi. Selain itu adanya keterbukaan wakil rakyat yang secara informal mendengarkan aspirasi masyarakat merupakan salah satu modal dalam mengawal penataan kawasan sungai. Keterbukaan komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat perlu dikembangkan secara intensif. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Emmanuel Adi Prasetya:

“Komisi C DPRD Kota siap mendengarkan aspirasi masyarakat di sekitar sungai. Usulan dan pendapat bisa dikomunikasikan secara informal

tanpa harus ke Kantor DPRD. Komisi C DPRD Kota siap mengawal dan mengkomunikasikan usulan dan permasalahan masyarakat kepada dinas terkait di Kota Yogyakarta.”¹⁴

Meningkatnya adaptasi dan aspirasi masyarakat juga berpengaruh terhadap partisipasi dan kebiasaan penduduk pada sikap/tindakan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam hal ini adalah keterlibatan masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam proses pengidentifikasian masalah, pembuatan keputusan, pelaksanaan kegiatan, maupun monitoring kegiatan, baik secara sukarela maupun memiliki kepentingan demi kehidupan dan lingkungan mereka. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan penataan kawasan Sungai Winongo merupakan upaya yang dilakukan oleh FKWA di Pakuncen Yogyakarta.. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan penataan sungai bertujuan untuk menjaring aspirasi dan kepentingan masyarakat. Sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan tidak bertolak belakang dengan kebutuhan masyarakat.

Meningkatnya partisipasi masyarakat menjadi lebih terbuka dalam penataan permukiman kumuh di sempadan sungai merupakan suatu kemajuan. Masyarakat yang berada di bantaran sungai, mempunyai kesempatan untuk mengusulkan penataan kawasan sungai yang masuk dalam kawasan kumuh. Hal ini senada dengan pernyataan Bapak Agus Tri Haryono:

“Dinas PUPKP Kota Yogyakarta dapat menerima usulan masyarakat terkait pembangunan infrastruktur permukiman. Pemerintah Kota siap mengawal program pengentasan kawasan kumuh di bantaran sungai dengan bekerjasama dengan komunitas. Kendala yang dihadapi adalah perencanaan pengentasan kawasan kumuh masih parsial.”¹⁵

Adanya penataan kawasan Sungai Winongo berbasis masyarakat oleh FKWA di Pakuncen ini berdampak pada peningkatan partisipasi masyarakat, jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi sebelumnya.. Hal ini akan berpengaruh terhadap kebiasaan penduduk yang semula menganggap bahwa

¹⁴ Emanuel Adi Prasetya, Wawancara, 12 Oktober 2017.

¹⁵ Agus Tri Haryono, Wawancara, 5 November 2017.

sungai adalah tempat sampah, tempat BAB, dan tempat kumuh lainnya. Di kota Yogyakarta bantaran sungai yang awalnya adalah tempat sampah dan kandang ternak, sekarang sudah ada 8 lokasi yang dibenahi dan menjadi Ruang Terbuka Hijau., Salah satunya di Pakuncen yang mempunyai Ruang Terbuka Hijau namun masih Pasif digunakan. Gerakan peduli sungai yang dimulai FKWA dari kota Yogyakarta tahun 2009 , telah berhasil mengajak masyarakat bantaran sungai yang ada di hulu sungai dan hilir Sungai Winongo untuk berpartisipasi dalam penataan kawasan sungai. Kemajuan ini ditandai dengan terbentuknya FKWA Sleman dan FKWA Bantul. Kegiatan – kegiatan FKWA juga sudah dicontoh oleh komunitas- komunitas lain. Komunitas- komunitas sungai saat ini pun mulai berkembang di kota Yogyakarta maupun di wilayah lainnya. Adanya penghargaan yang diterima oleh FKWA sebagai salah satu komunitas sungai yang melakukan upaya penataan kawasan sungai terbaik oleh PU pada tahun 2013.

Dampak selanjutnya, perilaku akibat dari penataan kawasan Sungai Winongo berbasis masyarakat oleh FKWA di Pakuncen Yogyakarta, adalah meningkatnya gotong- royong. Kunci keberhasilan penataan kawasan sungai dalam tahapannya memerlukan sikap gotong-royong dari masyarakat. Sikap Gotong-royong sebenarnya sudah ada di masyarakat, tetapi dengan adanya penataan kawasan sungai ini gotong royong masyarakat meningkat. Masyarakat dituntut untuk aktif ikut gotong-royong sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama. Dengan sikap gotong-royong yang tinggi diharapkan hubungan antar masyarakat menjadi lebih erat. Sehingga kesadaran dan pola perilaku yang baik dapat tumbuh di masyarakat. Bentuk gotong royong warga adalah sikap bantu membantu satu sama lain dalam bentuk tenaga, pikiran, dan bentuk kebersamaan masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Edi:

“Anu mbak penataan kawasan ini membuat masyarakat lebih bersama gotong royongnya, tambah semangat ikut pelaksanaannya. Gotong royong ini berbentuk macam-macam mbak kadang waktu angkut material ya kadang waktu pembangunan.”¹⁶

¹⁶ Edi, Wawancara, 16 Januari 2018.

Selain itu dampak sosial dan perilaku terkait meningkatnya gotong royong dalam penataan kawasan sungai di Pakuncen juga mulai mempengaruhi dan menyadarkan masyarakat sebagai bentuk kebersamaan. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Suryati selaku warga Pakuncen:

“Meningkat mbak gotong-royongnya. Saling membantu satu sama lain. Lha sedikit-sedikit itu masyarakat agak sadar pentingnya kebersamaan. Tahu sendiri masyarakat kota itu karakternya bagaimana. Adanya pembangunan kawasan sungai ini membuat warga tambah kebersamaan, tambah gotong-royongnya dan juga mbak tambah tahu kebersamaan. Jadi itu yang buang sampah sampah di sungai ya agak merasa sungkan lah ya mbak. Orang sudah dikerjakan bareng kayak gini oleh warga masak ya mau ada sampahnya dibuang di sungai lha kita itu gotong royongnya gak waktu pembangunan aja mbak kita gotong-royongnya waktu angkut-angkut bahan, terus waktu mertikali, apalagi pas musim hujan.”¹⁷

Perubahan dari proses penataan kawasan Sungai Winongo ada yang berupa fisik pembangunan, sosial perilaku dan ada pula yang di bidang ekonomi. Penataan kawasan sungai Winongo di Pakuncen ini merupakan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di sini bertujuan untuk memberdayakan seseorang/masyarakat yang lemah agar berdaya dan dapat memenuhi kebutuhannya. Secara ekonomi, dengan adanya penataan kawasan Sungai Winongo di Pakuncen ini dapat menghasilkan pendapatan bagi masyarakat. Sekitar, Walaupun efek tersebut belum bisa dirasakan secara langsung dan menyeluruh bagi masyarakat Pakuncen RW 10.

Dampak ekonomi yang dimaksudkan adalah munculnya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat di bantaran Sungai Winongo. Kegiatan ini dilakukan oleh warga dengan berjualan di pinggir sungai. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan warga itu sendiri. Setidaknya terdapat dampak positif dari penataan kawasan Sungai Winongo berbasis masyarakat di Pakuncen. Adapun dampak ekonomi yang telah dirasakan masyarakat karena adanya penataan kawasan sungai sebagai berikut; peningkatan pendapatan ekonomi menjadi tolak ukur dalam melihat dampak dari suatu penataan kawasan

¹⁷ Suryati, Wawancara, 13 Maret 2018.

Sungai Winongo yang berbasis masyarakat di Pakuncen. Penataan kawasan sungai memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian warga yang berada di bantaran sungai. Di sekitar kawasan sungai ini lah warga dapat berjualan, salah satunya dengan membuka angkringan. Walaupun dampak ekonomi tidak dapat dirasakan secara langsung, setidaknya kegiatan ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Selain adanya peningkatan pendapatan, dampak yang terjadi akibat penataan kawasan Sungai Winongo adalah munculnya kegiatan ekonomi yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dimaksudkan bahwa penataan kawasan sungai ini berdampak pada perekonomian masyarakat bantaran sungai. Mereka dapat melakukan kegiatan/tindakan ekonomi yang menunjang peningkatan pendapatan. Di RW 10 Pakuncen tindakan ekonominya dimulai dengan adanya angkringan pinggir sungai. Benar adanya bahwa tindakan ekonomi ini masih dalam proses tidak dapat dirasakan warga. Maksudnya, warga belum sepenuhnya sadar bahwa secara perlahan kegiatan ekonomi di bantaran sungai dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Ana:

“Tindakan ekonomi sudah ada mbak, dan gimana ya, menurut saya belum ya kalau membentuk jaringan. Soalnya baru dimulai, jadi baru beberapa warga yang sudah mulai merasakan dampak dari penataan kawasan sungai. Dan kalau dibilang kelompok peduli sungai, kita ada, namun kegiatannya memang masih belum aktif baru sekedar kader lingkungan., Dan juga kegiatan ekonomi di sini, ya masih sebatas itu.”¹⁸

Dapat penulis simpulkan bahwa dampak ekonomi penataan kawasan Sungai Winongo di Pakuncen adalah meningkatnya pendapatan dan munculnya tindakan ekonomi masyarakat yang terdampak karena penataan kawasan tersebut. Hal ini sesuai dengan tori Bintarto yang menyatakan bahwa dampak ekonomi yang terjadi setelah proses pembangunan berwawasan lingkungan dengan adanya tindakan ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan dan peningkatan pendapatan.

¹⁸ Ana, Wawancara, 27 Februari 2018.

Adanya penataan kawasan Sungai Winongo yang ada di RW 10 ini, penulis juga menemukan dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah adanya akses jalan yang mudah, sehingga banyak remaja luar/bukan remaja RW 10 Pakuncen yang sering menjadikan pinggir Sungai Winongo sebagai tempat berkumpul dan berkegiatan. Kegiatan remaja tersebut yakni berpacaran, nongkrong hingga larut bahkan adapula yang minum-minuman keras. Hal ini meresahkan masyarakat sekitar. Melihat persoalan tersebut, masyarakat berinisiatif untuk membuat portal guna menutup akses mereka. Selain itu, di pinggir Sungai Winongo jumlah lampu penerangan masih kurang, sehingga banyak anak-anak yang bersembunyi untuk melakukan aktivitas yang kurang baik. Penataan kawasan di Pakuncen ini juga berdampak negatif. Dampak negatif tersebut muncul karena daerah pinggir sungai dijadikan basecamp dan tempat berkumpul para remaja. Sayangnya kegiatan yang mereka lakukan adalah kegiatan yang menyimpang, sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Seperti yang diungkapkan Bapak Edi dan Bapak Iwan:

“Iya di pinggir sungai itu dibuat kumpul remaja lho buk, terus ya di pinggir sungai banyak anak SD yang pacaran. Karena itu RT 47 sepakat membuat portal. Ternyata portalnya justru dilem sama anak-anak tersebut. Lha maunya apa? Yang ronda ya juga sudah jaga ya ada. Malahan kalau waktu mabuk gitu. Sini ya nggak mau kalau wilayah kami diinjakinjak anak kayak gitu.”¹⁹

“Setau saya pinggir kali sekarang malah dibuat mejeng(bergaya) sama anak-anak luar kampung. Saya ndak tahu, apakah ada anak dalam yang mengajak atau bagaimana yang jelas sempat ada yang terciduk, saat minum atau apa. Nah yang disayangkan ada anak kampung sini RW sebelah atau bahkan anak RW 10 sendiri. Makanya dianggap yang mengajak anak tersebut. Lha gimana anak SD sekarang sudah pacaran tiap malam sabtu ya dampak sekolah fullday. Abis itu anak-anak SMP itu juga ngumpul-ngumpul sampai malem ketawa keras njuk (terus) motor diblayer-bleyer (memainkan gas motor) kan sangat mengganggu warga itu.”²⁰

¹⁹ Edi, Wawancara, 25 April 2018.

²⁰ Iwan, Wawancara, 25 April 2018.

Kondisi yang diutarakan informan masih menjadi masalah yang dihadapi dalam program penataan bantaran sungai Winongo. Selama ini fokus utama program lebih kepada pembangunan fisik. Namun cenderung kurang memperhatikan pengembangan kapasitas individu. Ke depan program diharapkan lebih aplikatif mengelola pantaan *capacity building* dengan pelatihan penyadaran masyarakat. Program ini dapat dilakukan dengan mekanisme pembagian kerja. Satu sisi pembangunan fisik yang perlu ditambahkan. Di sisi lain, program kapasitas individu untuk menyadari pentingnya menjaga norma dan lingkungan penting juga untuk diperhatikan.

Penutup

Proses penataan kawasan Sungai Winongo berbasis masyarakat oleh FKWA di Pakuncen Yogyakarta melalui 6 tahap. Tahap tersebut dimulai dari *assesment*, perencanaan, *lobbying*, pelaksanaan atau implementasi, monitoring dan evaluasi. Proses penataan tersebut melibatkan masyarakat. FKWA menjadi lembaga kunci yang mampu menjembatani kebutuhan dan persoalan masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah. Tanpa FKWA masyarakat tidak mengetahui persoalan yang dialami. Sedangkan dampak penataan kawasan sungai di Pakuncen lebih banyak bernilai positif dibanding negatifnya. Dampak tersebut antara lain perubahan kondisi fisik atau lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat, partisipasi masyarakat, semangat gotong royong, dan dampak secara ekonomi. Sedangkan dampak negatifnya adalah dijadikannya area pinggir sungai tempat perkumpulan remaja untuk penyimpangan kenakalan remaja. Penataan kawasan Sungai Winongo berbasis masyarakat oleh FKWA di Pakuncen Yogyakarta telah mampu mengurangi permasalahan permukiman kumuh dan mengurangi permasalahan sosial namun belum bisa maksimal di masing-masing wilayah.

Berdasarkan proses di atas akan lebih baik jika terdapat optimalisasi pemanfaatan lingkungan fisik. Selama ini sudah dibangun ruang terbuka hijau, namun fasilitas di ruang tersebut belum lengkap. Penulis menyarankan untuk dibangun *gazebo* di ruang terbuka hijau sehingga masyarakat dapat

memanfaatkannya untuk kegiatan yang lebih produktif bernilai ekonomis. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan dengan membentuk kelompok peduli sungai. Kelompok ini dapat memaksimalkan perawatan dan pemanfaatan fasilitas yang ada di RW 10 Pakuncen. Selain itu, pengadaan *lampunisasi* di sekitar kawasan Sungai Winongo RW 10 Pakuncen juga perlu dibuat program. Melalui penerangan kawasan disinyalir dapat meminimalisir perkumpulan remaja yang sering memanfaatkan fasilitas pinggir sungai sebagai tempat berpacaran atau perilaku menyimpang lain.

Daftar Pustaka

- Adi, Isbandi Rukminto. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Aminah, Siti. "Fenomena Social Loafing dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Binaan PMI: Studi Fenomenologi dalam Praktek Pengembangan Masyarakat." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan* 1, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.14421/jpm.2017.011-07>.
- Brontowiyono, Widodo, Ribut Lupiyanto, dan Donan Wijaya. "Pengelolaan Kawasan Sungai Code Berbasis Masyarakat Widodo." *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan* 2, no. 1 (2010): 7–20. <https://doi.org/10.20885/jstl.vol2.iss1.art2>.
- Indrawati, Sekar Ika. "Keragaman Pemanfaatan Sungai oleh Masyarakat Bantaran Sungai Winongo di Kecamatan Ngampilan dan Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2010." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.
- Karim, Tony. "Pengaruh Penataan Bantaran Sungai Bau-Bau Terhadap Pola Hunian Masyarakat di Kelurahan Tomba dan Bataraguru Kota Bau-Bau." Universitas Diponegoro, 2010.
- Maryati. "Anies Baswedan Pelajari Penataan Kawasan Sungai Winongo." *Antaraneews.Com*. 2017. <https://www.antaraneews.com/berita/641285/anies-baswedan-pelajari-penataan-kawasan-sungai-winongo>.
- Mikkelsen, Britha. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

- Muslim, Aziz. *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2012.
- . “Manajemen Pengelolaan Masjid.” *Aplikasia* 5, no. 2 (2004).
- Penyusun. “Laporan Antara Rencana Pengembangan Kawasan Sungai Winongo.” Yogyakarta, 2010. Jogjakota.go.id.
- Putro, Jawas Dwijo. “Penataan Kawasan Kumuh Pinggiran Sungai di Kecamatan Sungai Raya.” *Jurnal Teknik Sipil* 11, no. 1 (2011).
- Rozaki, Abdur. *Islam, Oligarki Politik, dan Perlawanan Sosial*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Situmorang, Abdul Wahid. *Gerakan Sosial: Studi Kasus Beberapa Perlawanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Slamet, M. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB Press, 2003.
- Sudibyo, Agus. “Wacana Penjarahan dan Kekerasan Simbolik Terhadap Petani.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 2, no. 3 (1999): 71–89. <https://doi.org/10.22146/JSP.11150>.
- Yudha, Prakasa, Danar Oscar Radyan, dan Fanani Angga Akbar. “Urban Tourism Based on Social Capital Development Model.” *Eurasia: Economics & Business* 19, no. 1 (2019): 37–42. <https://doi.org/10.18551/econeurasia.2019-01>.

